

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI
KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DI KOTA BIMA (STUDI KASUS KECAMATAN RABA)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

**PUTRI RAHMADANI
(217130082)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM
KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BIMA (STUDI
KASUS KECAMATAN RABA)**

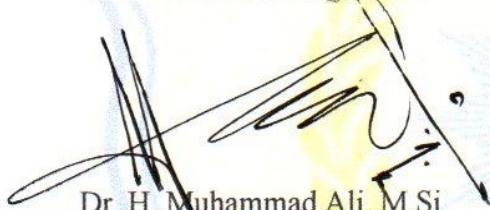
Oleh :

PUTRI RAHMADANI

Untuk Memenuhi Ujian Sidang Skripsi
Pada tanggal 15 Februari 2021

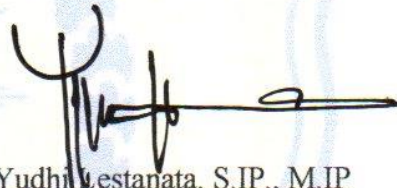
Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I




Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

Pembimbing II



Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM
KOTA TANPA KUMUH DI KOTA BIMA (STUDI
KASUS KECAMATAN RABA)**

Oleh :

PUTRI RAHMADANI

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 15 Februari 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801



Ketua

2. Yudhi Lestana, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801



Anggota

3. Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si
NIDN. 0815118302



Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di Perguruan Tinggi Lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 15 Februari 2021

Mahasiswa,



Putri Rahmadani
217130082



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahmadani
NIM : 217130082
Tempat/Tgl Lahir : Kota Bima, 07 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085333418599 / putri.rahmadani776@gmail.com
Judul Penelitian :

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Bima (Studi Kasus Kecamatan Rebo)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 9 Maret 2021

Penulis



Putri Rahmadani
NIM. 217130082

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahmedani
NIM : 217130082
Tempat/Tgl Lahir : Kota Bima, 07 Jul 1995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085333478599 / putriahmedani776@gmail.com
Jenis Penelitian Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul

Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Bima (Studi Kasus Kecamatan Raba)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 5 Maret 2021

Penulis



Putri Rahmedani
NIM. 217130082

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

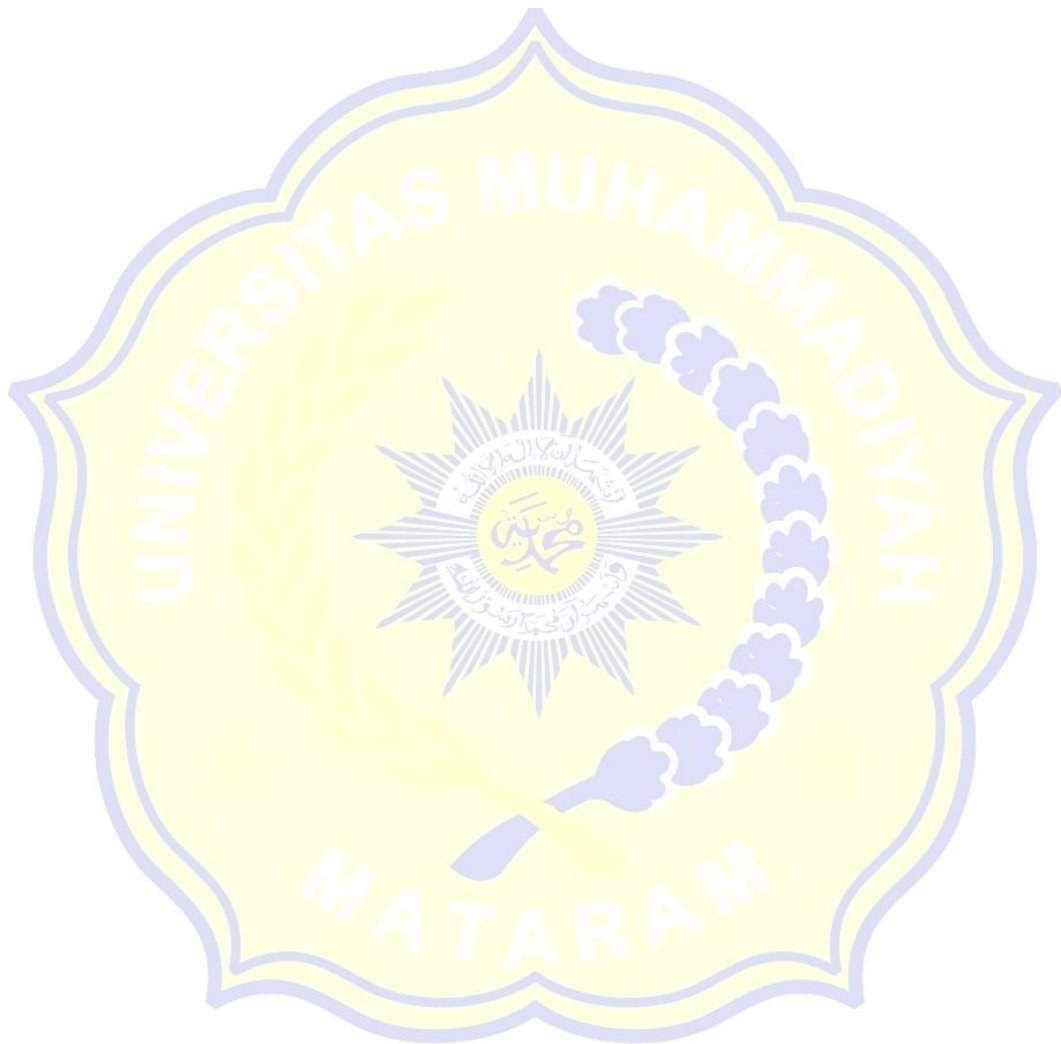
**Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada
Mama Dan Papa Tercinta Serta Saudara-
Saudari Ku Tersayang**



MOTO HIDUP

Teruslah Berjalan Di Jalan Berbunga

Ukir Namamu Disetiap Perjalanan

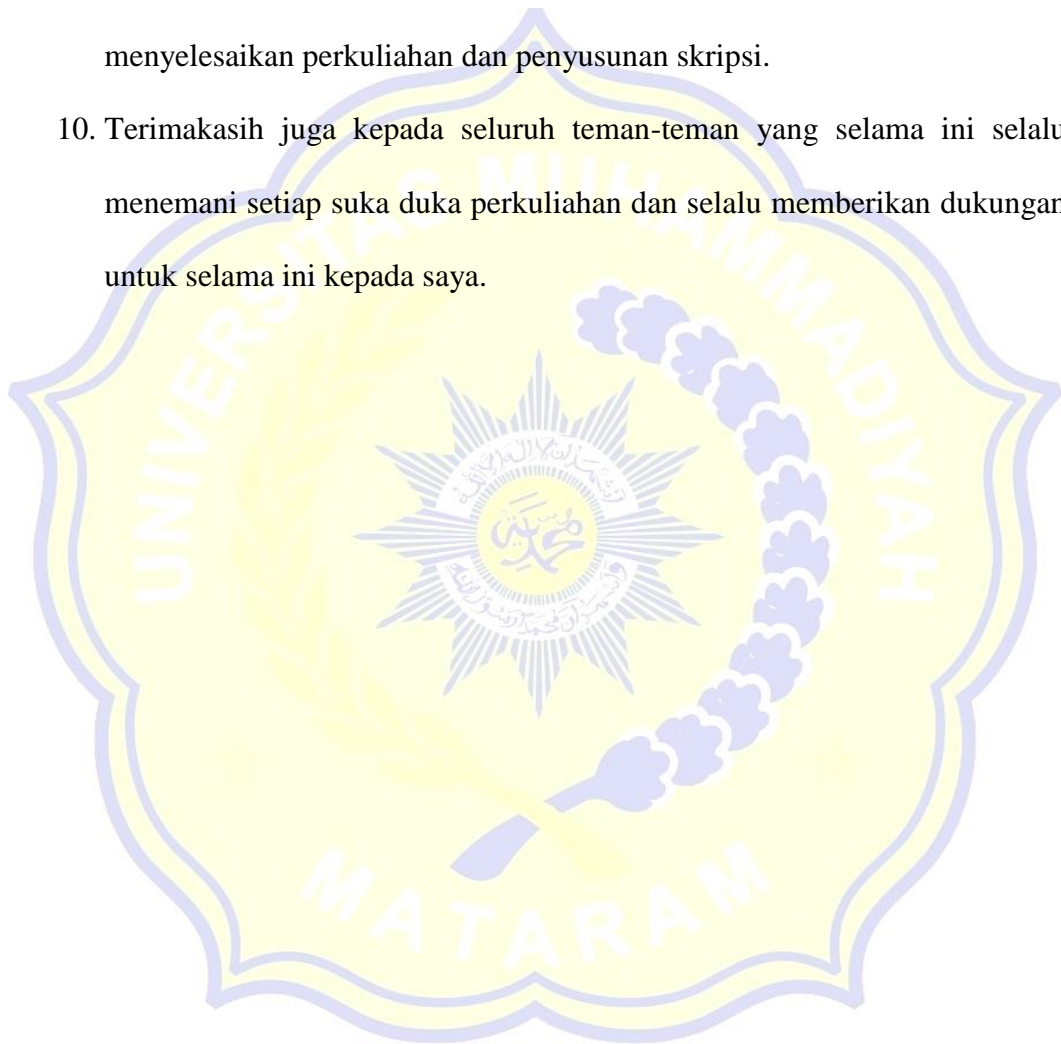


UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si dan juga selaku Dosen Pembimbing I.
4. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dedy Iswanto, S.T., MM dan Wakil Dekan II Bapak Amin Saleh, S.Sos., M.Si.
5. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP.
6. Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP dan juga selaku Dosen Pembimbing II.
7. Terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik dari semester satu sampai sekarang.

8. Yang penulis cintai dan hormati, yakni kepada kedua orang tua (Mama dan Papa) yang sudah bersusah payah mendukung saya dan selalu memberikan motivasi tiadahentinya.
9. Terimakasih kepada seluruh keluarga saya Kakak, Abang, Adik, Paman dan Bibi yang selalu mendukung dan mensupport saya sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman yang selama ini selalu menemani setiap suka duka perkuliahan dan selalu memberikan dukungan untuk selama ini kepada saya.



STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA BIMA (STUDI KASUS KECAMATAN RABA)

Putri Rahmadani

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) khususnya di Kecamatan Raba melalui kegiatan Program Skala Kawasan Kota Baru. Pada penelitian ini Program Skala Kawasan Kota Baru yang dialokasikan pada 4 Kelurahan di Kecamatan Raba yaitu Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rontu, Kelurahan Penaraga, dan Kelurahan Rabangodu Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder, data primer berupa data utama yang diperoleh dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa arsip dan data-data lain.

Hasil penelitian bahwa capaian luas kawasan kumuh Skala Kawasan Kota Baru yang terdapat di Kecamatan Raba terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Penaraga dengan luas kawasan kumuh 8,49 Ha dengan capaian pengurangan kumuh mencapai 1,2 Ha dan sisa luasan kumuh mencapai 7,29 Ha. Kelurahan Rontu dengan luas kawasan kumuh mencapai 3,17 Ha dengan capaian pengurangan kumuh mencapai 2,45 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 0,77 Ha. Kelurahan Rabadompu Barat dengan luas kawasan kumuh 1,78 Ha dan capaian pengurangan kumuh mencapai 0,7 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 1,08 Ha. Kelurahan Rabangodu Utara dengan luas kawasan kumuh mencapai 5,81 Ha dengan capaian pengurangan kumuh mencapai 1,8 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 4,01 Ha. Dengan demikian total pencapaian pengurangan kumuh skala kawasan Kota Baru mencapai 6,15 Ha dan sisa luas kawasan kumuh mencapai 13,10 Ha.

**THE LOCAL GOVERNMENT STRATEGY IN RESOLVING THE POVERTY
THROUGH CITY WITHOUT SLUMS PROGRAM (KOTAKU) IN KOTA
BIMA (CASE STUDY OF RABA DISTRICT)**

Putri Rahmadani

Governmental Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study was conducted to evaluate the government's strategy for overcoming poverty through the City Without Slum (KOTAKU) program, specifically the Kota Baru Area Scale Program in Raba District. In this study, the Kota Baru Area Scale Program was allocated to 4 Kelurahan in Raba Subdistrict, namely Rabadompu Barat Village, Rontu Village, Penaraga village, and Rabangodu Utara Village. The analysis method used in this study is qualitative. Primary and secondary data were used in this study; preliminary data was collected first-hand in the field through observations and interviews, while secondary data came from records and other sources.

The findings revealed that the slum area of the Kota Baru Area in Raba District is made up of four villages, the largest of which is Penaraga Village, which has an area of 8.49 hectares of slum areas with a slum reduction of 1.2 hectares and a remaining slum area of 7.29 hectares. Rontu Village has a slum area of 3.17 hectares, with a slum reduction of 2.45 hectares and a remaining slum area of 0.77 hectares. Rabadompu Barat Village has a slum area of 1.78 hectares, with a slum reduction of 0.7 hectares and a remaining slum area of 1.08 hectares. Rabangodu Utara Village has a total slum area of 5.81 hectares, with a slum reduction of 1.8 hectares and a remaining slum area of 4.01 hectares. As a result, the overall slum reduction achieved in the Kota Baru region was 6.15 ha, while the remaining slum area was 13.10 ha.

MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga pada akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Bima (Studi Kasus Kecamatan Raba)”. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi Sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP).

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan tepatnya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Mataram, 15 Februari 2021

Penulis

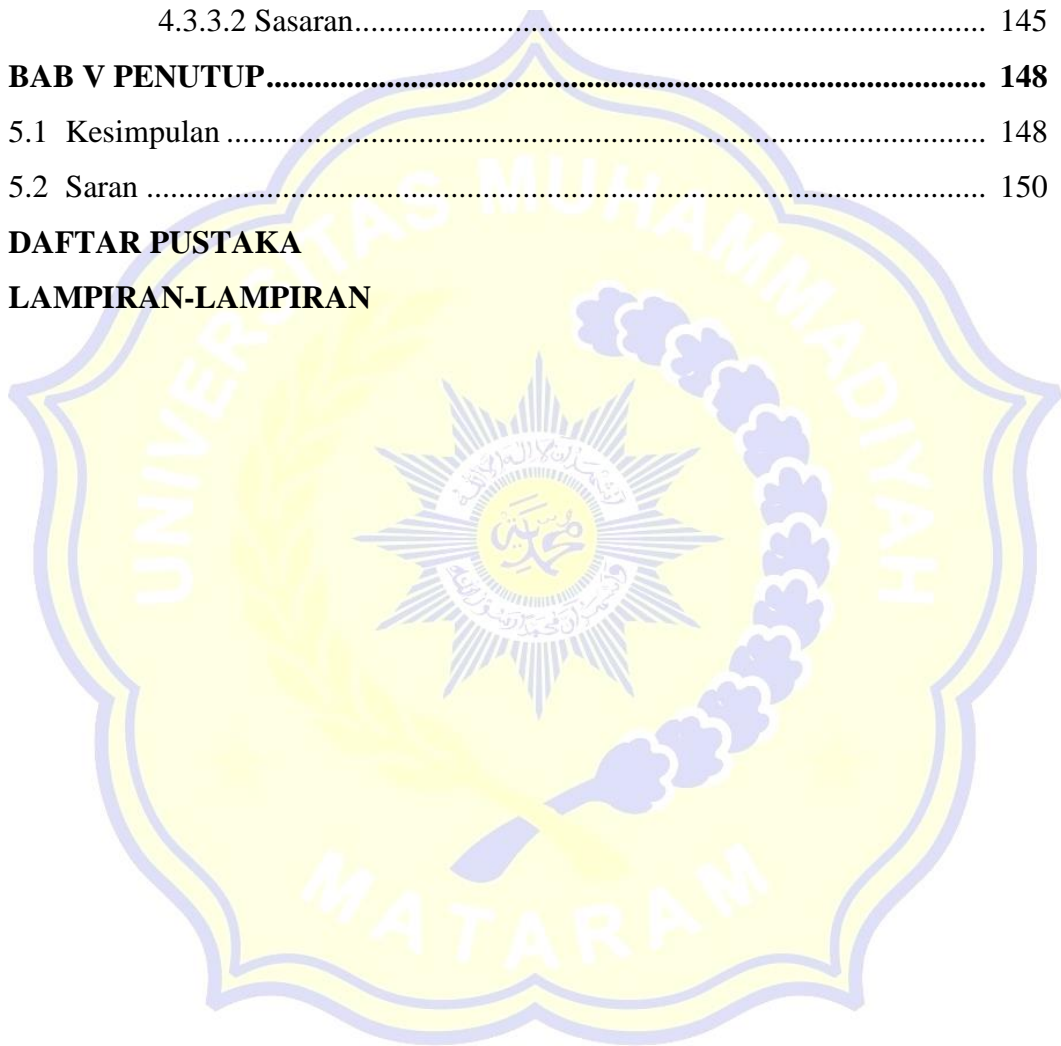
DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTO HIDUP	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	21
2.2.1 Konsep Strategi	21
2.2.1.1 Definisi Strategi	21
2.2.1.2 Manajemen Strategi	22

2.2.1.3	Aspek-Aspek Strategi	29
2.2.1.4	Faktor Yang Mempengaruhi Strategi.....	30
2.2.1.5	Evaluasi Strategi	31
2.2.2	Pemerintah Daerah	33
2.2.2.1	Definisi Pemerintah Daerah	33
2.2.2.2	Kewenangan Pemerintah Daerah	33
2.2.2.3	Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	35
2.2.3	Kemiskinan.....	37
2.2.3.1	Definisi Kemiskinan	37
2.2.3.2	Bentuk dan Jenis Kemiskinan	39
2.2.3.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan.....	43
2.2.3.4	Pola Kemiskinan	46
2.2.3.5	Penyebab Kemiskinan.....	47
2.2.3.6	Penanggulangan Kemiskinan.....	48
2.2.4	Konsep Pemberdayaan	50
2.2.4.1	Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	53
2.2.4.2	Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	56
2.2.4.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat	58
2.2.4.4	Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat	60
2.2.5	Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	63
2.3	Kerangka Berpikir	65
2.3.1	Definisi Konseptual	68
2.3.2	Definisi Operasional	69
BAB III METODE PENELITIAN		71
3.1	Jenis Penelitian.....	71
3.2	Lokasi Penelitian.....	71
3.3	Fokus Penelitian.....	71
3.4	Teknik Penentuan Informan.....	72
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.5.1	Teknik Observasi	72

3.5.2 Wawancara.....	73
3.5.3 Dokumentasi	73
3.6 Sumber Data.....	74
3.6.1 Data Primer	74
3.6.2 Data Sekunder	75
3.7 Teknik Analisis Data.....	75
3.7.1 Reduksi Data	76
3.7.2 Penyajian Data	76
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	76
BAB IV PEMBAHASAN.....	78
4.1 Profil Umum Kecamatan Raba	78
4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Raba.....	78
4.1.2 Pemerintahan Kecamatan Raba.....	84
4.1.3 Kependudukan dan Ketenagakerjaan	90
4.2 Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	102
4.2.1 Formulasi Strategi	102
4.2.1.1 Visi dan Misi	102
4.2.1.2 Tujuan Jangka Panjang.....	105
4.2.2 Implementasi Strategi.....	108
4.2.2.1 Anggaran	111
4.2.2.2 Memberdayakan Sistem Informasi.....	115
4.2.3 Evaluasi Strategi.....	118
4.2.3.1 Meninjau Ulang	119
4.2.3.2 Mengukur Kinerja	121
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Aspek Pemberdayaan)	123
4.3.1 Aspek Masukan / Input	123
4.3.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	123
4.3.1.2 Rencana	129

4.3.2	Aspek Proses	133
4.3.2.1	Pelaksanaan	133
4.3.2.2	Monitoring	139
4.3.2.3	Pengawasan	141
4.3.3	Aspek Keluaran / Output	142
4.3.3.1	Pencapaian	142
4.3.3.2	Sasaran	145
BAB V PENUTUP		148
5.1	Kesimpulan	148
5.2	Saran	150
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



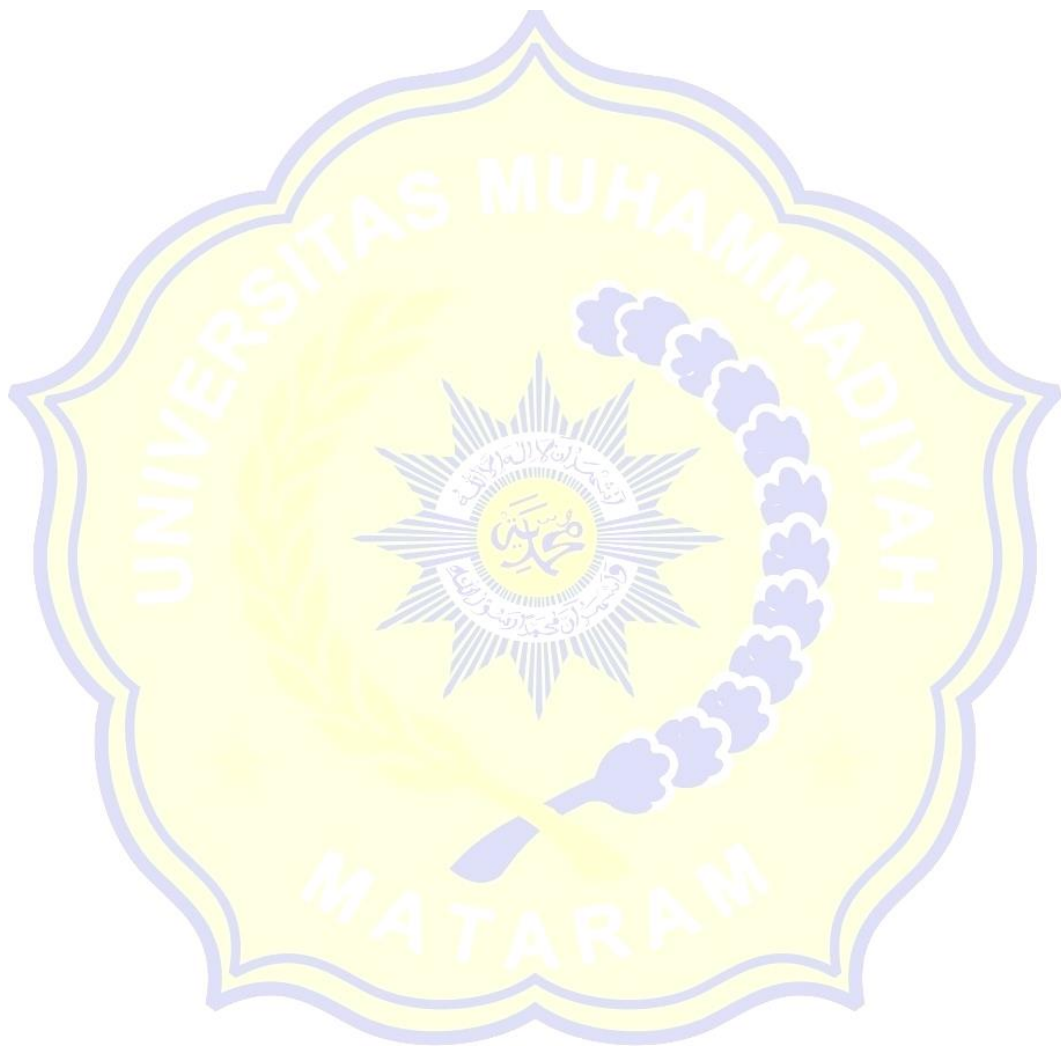
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan Raba Dirin Perkelurahan 2018.....	80
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Raba (hektar) Menurut Jenis Penggunaan Tanah Dirinci Perkelurahan 2018.....	81
Tabel 4.3 Tinggi Ibukota Kelurahan Dari Permukaan Laut (meter) Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	82
Tabel 4.4 Jarak Kelurahan dengan Ibukota Kota Bima dan Kecamatan Raba (kilometer) Dirinci Perkelurahan 2018	83
Tabel 4.5 Jumlah Kelurahan Menurut Klasifikasi Kelurahan Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018.....	85
Tabel 4.6 Kategori Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Raba 2018.....	86
Tabel 4.7 Jumlah Lurah Menurut Tingkat Pendidikan Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018.....	87
Tabel 4.8 Kumlah Aparat Pemerintahan Dirinci Perkelurahan Di Kecamatan Raba 2018.....	88
Tabel 4.9 Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018.....	89
Tabel 4.10 Luas Wilayah Kelurahan Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Raba 2018.....	91
Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	92
Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Menurut Status Kewarganegaraan Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	93
Tabel 4.13 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga dan Rata-Rata Anggota Rumah Tangga Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	94
Tabel 4.14 Jumlah Kelahiran dan Kematian Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018.....	95

Tabel 4.15 Jumlah Keluarga Menurut Sumber Air Untuk Memasak Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	96
Tabel 4.16 Jumlah Keluarga Menurut Bahan Bakar Untuk Memasak Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	97
Tabel 4.17 Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Sektor Pertanian Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	98
Tabel 4.18 Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Sektor Non Pertanian Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	99
Tabel 4.19 Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Sektor Pemerintahan Dirinci Perkelurahan di Kecamatan Raba 2018	100
Tabel 4.20 Visi dan Misi	104
Tabel 4.21 Tujuan Pembangunan RPJMD	107
Tabel 4.22 Kegiatan Skala Lingkungan dan Skala Kawasan Kota Baeu	110
Tabel 4.23 Anggaran Kegiatan Penanganan Skala Kawasan	113
Tabel 4.24 Jenis Pemantauan	121
Tabel 4.25 Mengukur Kinerja	123
Tabel 4.26 Pemilihan Lokasi Kawasan Prioritas	130
Tabel 4.27 Rencana Kegiatan Penanganan Kumuh Skala Kawasan Kota Baru	132
4.28 Permasalahan Kumuh	135
Tabel 4.29 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Rembuk Warga Terdampak Proyek (WTP)	137
Tabel 4.30 Capaian Pengurangan Kumuh Kawasan Kota Baru	144

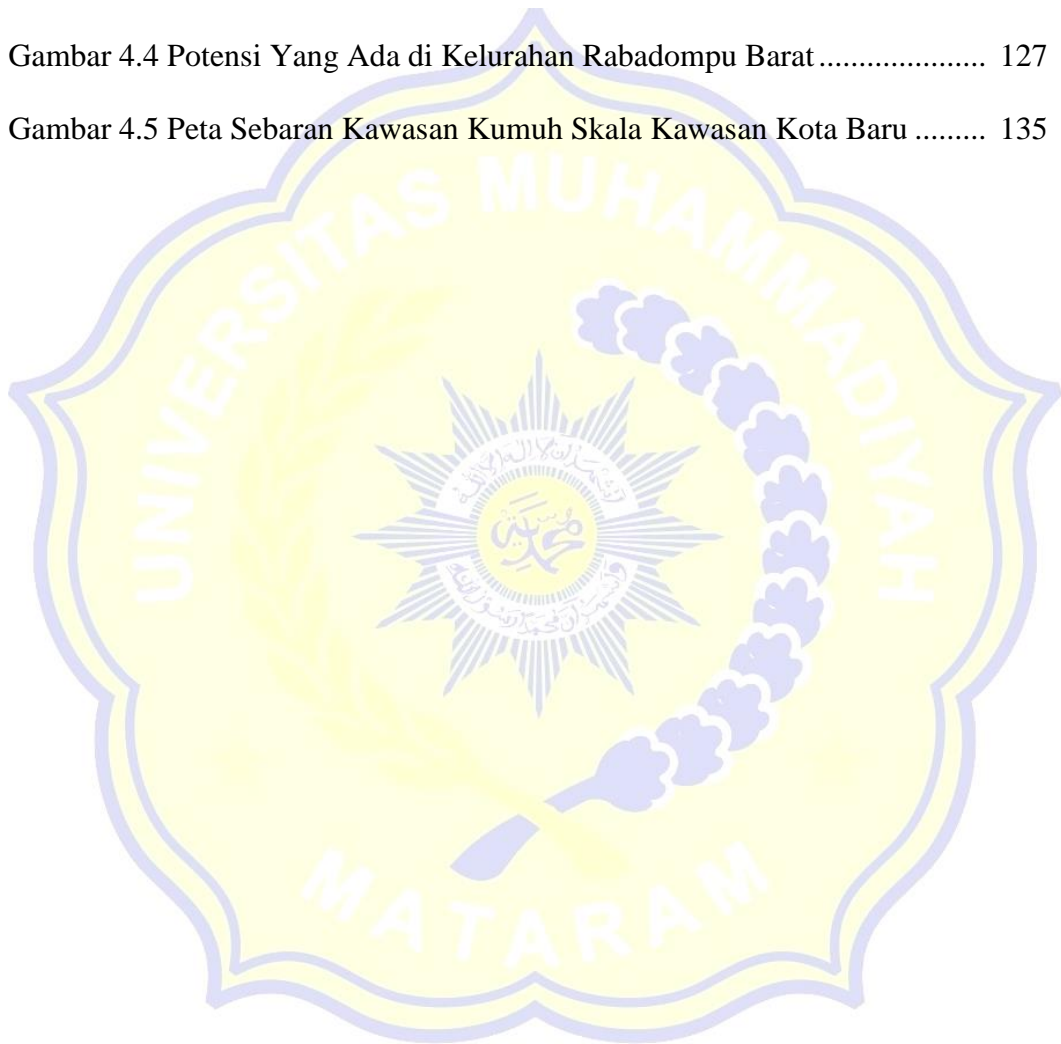
DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2,1 Kerangka Berpikir Peneliti	67
Bagan 4.1 Srtuktur Organisasi Kecamatan Raba	101



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Raba	78
Gambar 4.2 Cara Akses Ke SIM Kotaku	117
Gambar 4.3 Potensi Yang Ada di Kelurahan Rontu	127
Gambar 4.4 Potensi Yang Ada di Kelurahan Rabadompu Barat	127
Gambar 4.5 Peta Sebaran Kawasan Kumuh Skala Kawasan Kota Baru	135



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jenis Kegiatan dan Status Dokumen Kotaku Skala Kawasan Kota Baru

Lampiran 2 Rencana Kegiatan Penanganan Kumuh Skala Kawasan Kota Baru

Lampiran 3 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Rembug Warga Terdampak di Kelurahan Rontu

Lampiran 4 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Rembug Warga Terdampak di Kelurahan Rabadompu Barat

Lampiran 5 Siteplan Segmen Rontu

Lampiran 6 Ilustrasi Perencanaan Segmen Rontu

Lampiran 7 Siteplan Segmen Rabadompu Barat

Lampiran 8 Ilustrasi Lokasi Perencanaan Segmen Rabadompu Barat

Lampiran 9 Sebaran Warga Terdampak Proyek Kelurahan Rontu

Lampiran 10 Data Warga Terdampak Proyek Kelurahan Rontu

Lampiran 11 Sebaran Warga Terdampak Proyek Kelurahan Rabadompu Barat

Lampiran 12 Data Warga Terdampak Proyek Kelurahan Rabadompu Barat

Lampiran 13 Progres Perencanaan dan Pelaksanaan Skala Kawasan Kota Baru 2020

Lampiran 14 Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan penyakit yang ada pada suatu Negara yang harus diatasi, dengan cara menyembuhkannya atau paling tidak dapat dikurangi jumlahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Kemiskinan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menyangkut kondisi pemukiman yang kurang layak, kurangnya sarana sanitasi dan air bersih dipermukiman kumuh yang menandakan minimnya asset fisik dan infrastruktur pada kelompok miskin, yang menjadi isu kemiskinan di perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 (Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang akan dirumuskan secara tepat pada tahun 2019), menyangkut pembangunan dan pengembangan dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup, yaitu meningkatkan kualitas permukiman kumuh di perkotaan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh baru dan mata pencaharian. Dengan diumumkannya nol permukiman kumuh pada tahun 2019, diikuti dengan arah

kebijakan dan strategi utama, serta alokasi anggaran yang memadai sejak tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah penerapan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi, pemerintah menggunakan rencana “Kota Tanpa Kumuh” (KOTAKU) sebagai tindak lanjut dari rencana PNPM Mandiri Perkotaan. Salah satu tujuan dari rencana KOTAKU (Kota Bebas Kumuh) adalah untuk mengurangi kawasan kumuh dan kemudian membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Pemukiman Kembali (Pokja PKP) di tingkat kabupaten / kota. Dalam rencana tata kota tanpa permukiman kumuh, rencana pengelolaan permukiman kumuh diharapkan dikembangkan di tingkat kota / kabupaten dan dilembagakan di tingkat masyarakat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meningkatkan kualitas kawasan kumuh dengan menyediakan infrastruktur dan kegiatan, serta melaksanakan regulasi bersama untuk mengubah hidup bersih, masyarakat sehat dan mencegah perilaku kumuh, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (Tanzil, 2020:60).

Menyikapi fenomena perumahan dan permukiman kumuh membutuhkan keterlibatan pemerintah. Melibatkan pemerintah melalui program kegiatan yang komprehensif, termasuk upaya peningkatan peran pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai solusi alternatif penyelesaian permukiman kumuh di Indonesia.

Pemberdayaan adalah konsep yang bertujuan memberi orang lebih banyak tanggung jawab untuk bekerja. Jika otorisasi dilakukan oleh pengusaha, pimpinan atau tim secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik maka akan berhasil. Konsep pemberdayaan terkait dengan konsep *community development* dan *community-based development*. Pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi permukiman kumuh, karena dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, masyarakat akan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan sehingga dapat secara sukarela berpartisipasi dalam pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun. (Kholqi, 2020:2).

Kota Bima merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang ideal. Dengan kemajuan semua aspek pembangunan maka berdampak pada industri, meningkatnya mobilitas manusia, terputusnya masalah kependudukan, perluasan daya dukung dan pertambahan penduduk. Oleh karena itu, diperlukan kawasan pemukiman yang lebih luas dengan lahan yang terbatas di Kota Bima, yang mengakibatkan kawasan kumuh yang luas. (bimakini.com diakses pada 21 Desember 2020).

Berdasarkan SK Walikota Nomor 371 tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bima, tercatat sebanyak 17 kelurahan di Kota Bima masuk dalam kategori kumuh. Adapun 17 kelurahan kumuh di Kota Bima meliputi Kelurahan Kolo, Melayu, Jatiwangi, Jatibaru, Manggemaci, Santi, Rabangodu Utara, Rabadompu Barat, Rontu, Penaraga, Dara, Nae, Paruga, Sarae, Tanjung, Sambinae dan Monggonao. Kelurahan kategori kumuh terbagi di lima kecamatan, adapun tolak ukur tentang

kekumuhan dilihat dari beberapa kriteria, seperti drainase, kualitas sanitasi, ketersediaan air bersih, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur jalan. Besarnya Anggaran Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bima perkelurahan berbeda-beda ada yang sampai 1 milyar dan ada yang paling rendah Rp.350 juta (kahaba.net diakses pada 21 Desember 2020).

Tujuan pengumpulan data kawasan kumuh adalah untuk memahami dan mendeteksi kawasan kumuh di Kota Bima. Untuk menghadapinya harus dipetakan, termasuk kondisi dan langkah untuk mengatasinya. Penetapan daerah kumuh tersebut telah melalui tahapan dan pemeriksaan dari tim provinsi dan juga tim pusat. Sehingga melalui program KOTAKU, akan segera merumuskan dan menindaklanjuti dengan mengupayakan bantuan dari pemerintah pusat melalui anggaran APBN (kahaba.net diakses pada 21 Desember 2020).

Kecamatan Raba Kota Bima adalah salah satu Kecamatan yang menerima program KOTAKU di Kota Bima. Tujuan dari program KOTAKU adalah memperoleh infrastruktur dan pelayanan di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan, serta dapat menghindari luasnya kawasan permukiman kumuh (ppid.bimakota.go.id diakses pada 22 Desember 2020).

Peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan kota baru tahun 2019 dengan tema Ratu Raga Mantika dialokasikan pada empat kelurahan di Kecamatan Raba dengan target pengurangan kawasan kumuh kota baru seluas 19,22 ha, empat kelurahan tersebut yakni Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan

Rabangodu Utara, Kelurahan Rontu, dan Kelurahan Penaraga (wartantb.com diakses pada 22 Desember 2020).

Melalui APBD Perubahan dialokasikan anggaran sebesar 3 miliar untuk mendorong program kotaku skala kawasan dengan tema “Ratu Raga Mantika”. Anggaran dari Program Kotaku sebesar 24 miliar, untuk mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memberikan dukungan berkelanjutan, seperti UMKM. Serta mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga apa yang sudah terbangun. Dari rencana program ini diharapkan adanya keterlibatan masyarakat. Hingga pada akhirnya masyarakat bisa merasakan memiliki infrastruktur yang sudah dibangun dan bisa menjaganya dengan baik (bimakini.com diakses pada 22 Desember 2020).

Manfaat dari rencana tersebut antara lain pembentukan kelompok kerja perumahan dan permukiman di tingkat kabupaten / kota untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik, sehingga tercipta permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Selain itu, meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan infrastruktur. Tujuan akhirnya yaitu menurunkannya luas kawasan permukiman kumuh baik di Kecamatan Raba maupun di Kota Bima hingga menjadi nol hektar (kahaba.net diakses pada 23 Desember 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis memilih judul **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Bima (Studi Kasus Kecamatan Raba)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Raba?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Raba?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Raba.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Raba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademik

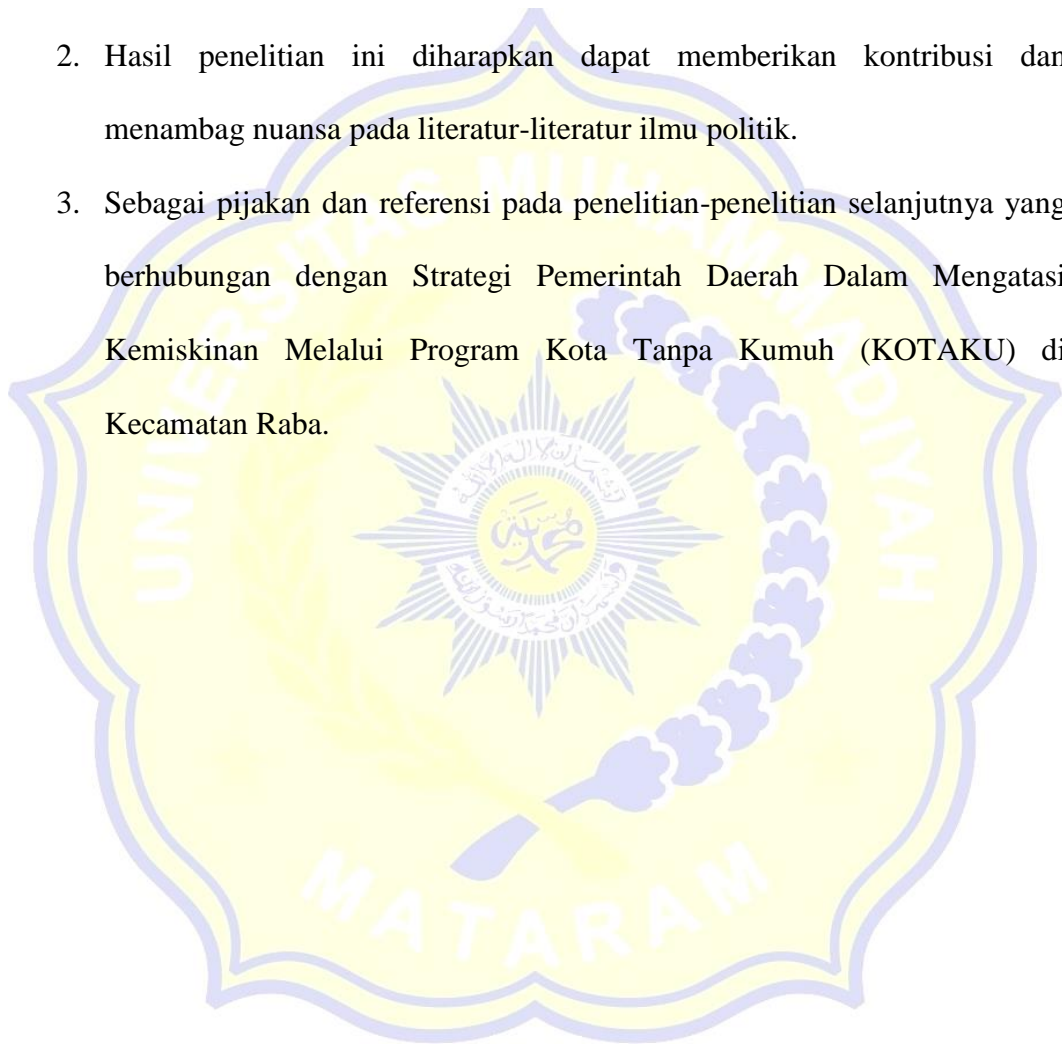
1. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan system informasi.
3. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
4. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi lembaga-lembaga pemerintahan terhadap Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Raba.
2. Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Raba.

1.4.3 Manfaat Teoritis

1. Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Raba.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambag nuansa pada literatur-literatur ilmu politik.
3. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Raba.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menjadi satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dan paper dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh David Tiviyanto, Bambang Irawan, dan Enos Paselle (2019) dengan judul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*. Hasil penelitian: dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan telah dilaksanakan, yaitu berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuannya,. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan khususnya pada kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang ada pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dikarenakan terbenturnya dengan pekerjaan utama dari masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda meliputi (1) Sosialisasi kegiatan Program KOTAKU; (2) Perencanaan kegiatan Program KOTAKU; (3) Partisipasi masyarakat dalam menjalankan Program KOTAKU; (4) Faktor pendukung dan penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program KOTAKU di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan Key Informan adalah Lurah Kelurahan Pelita, Informan adalah masyarakat Kelurahan Pelita Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahsanul Kholqi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (2020) dengan judul *Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru*. Hasil penelitian: Permukiman kumuh perkotaan muncul disebabkan ketidakmampuan atau kegagalan masyarakat untuk bisa bersaing menjangkau dan memiliki segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan

hidupnya. Adanya permukiman kumuh bisa jadi disebabkan oleh perkembangan dari kota tersebut. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi alternatif untuk menangani masalah permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Salah satu yang telah dibenahi melalui Program Kotaku adalah Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Tadinya Karangarangwaru yang merupakan kawasan kumuh, kini telah berubah menjadi kawasan yang aman, bersih, dan nyaman. Sungai Kali Buntung yang melintasinya sudah direvitalisasi sehingga air sungai tak lagi meluap, dan mampu menampung air hujan berintensitas tinggi. Selain itu, akses bantaran sungai juga digunakan sebagai jalur pemeliharaan sungai. Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru bisa dikatakan sudah baik terbukti dengan adanya pengembangan dan replica program yang dilakukan oleh masyarakat. Namun masih dibutuhkan pendampingan yang dilakukan baik Konsultan maupun pemerintah daerah kepada BKM agar program tetap terlaksana dan semakin baik. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer didapat melalui wawancara dengan narasumber yang

terkait langsung dengan topik penelitian dan data sekunder didapat melalui observasi, dokumentasi dan melalui bacaan baik artikel, jurnal dan penelitian sejenis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Lia Andriana, Asnawi Manaf Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro (2020) dengan judul *Relevansi Aspek Kemiskinan dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima Program KOTAKU (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)*. Hasil penelitian: Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, serta keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni. Hal tersebut yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh. Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan program KOTAKU dengan 7 (tujuh) kelurahan/desa yang menjadi prioritas penanganan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan permukiman yang baik dan sehat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah ada relevansi antara kemiskinan dan permukiman kumuh pada lokasi penerima program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi, yakni metode penelitian kualitatif menggunakan deskriptif kualitatif dan metode penelitian kuantitatif menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) dengan metode *overlay*. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan sebaran kawasan kumuh yang nantinya dapat membantu

pemerintah dan *stakeholder* terkait dalam mengambil keputusan guna merencanakan penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang (2019) dengan judul *Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Hasil penelitian: Pada tahap implementasi program KOTAKU di Kelurahan Merjosari dilaksanakan dalam 4 tahap utama yaitu pertama, tahap perencanaan dalam tahap ini program KOTAKU direncanakan sedemikian rupa kkegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan di Kelurahan Merjosari. Kedua, tahap survei lokasi dalam tahap ini kegiatan survei lokasi dilakukan oleh pihak faskel Kelurahan Merjosari. Dengan adanya tahap survei lokasi ini pihak faksel nantinya akan mengetahui keadaan lingkungan yang ada di Kelurahan Merjosari yang layak atau tidaknya dikatakan pemukiman kumuh dan dengan adanya surbvei lokasi. Ketiga, tahap pendanaan dalam tahap ini pendanaan sendiri berasal dari sumber APBN, sumber dana APBD Jawa Timur, sumber APBD Kota Malang, sumber dana swadaya masyarakat. Keempat, tahap pelaksana dalam tahap ini untuk program KOTAKU yang di laksanakan di Kelurahan Merjosari bahwasanya belum semuanya terlaksana hanya beberapa kegiatan yang sudah terencana seperti pembedahan rumah yang tidak layak, pembenahan lingkungan dan untuk permasalahan lain yang ada di masing-masing RW masih belum terencana. Jenis penelitian yang di ambil penulis adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Program penanganan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang layak huni di perkotaan, melalui pembangunan

infrastruktur berbasis masyarakat yang memberikan peranan masyarakat yang lebih besar. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program KOTAKU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang di hadapi dalam implementasi kebijakan program KOTAKU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun faktor penghambat dari program KOTAKU adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU. Faktor pendukung dari program KOTAKU masih ada sebagian masyarakat yang masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan program KOTAKU bahkan dengan sukarela memberikan bantuan berupa tenaga maupun materi. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dijan Rahajuni, Suprpto, Sri Lestari, Lilis Siti Badriah (2018) dengan judul *Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas*. Hasil penelitian: Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2015

mencapai 18,44% lebih tinggi 7,22% dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional yang mencapai 11,22%. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) yang sekarang diganti menjadi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Tujuan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Penelitian ini dilakukan pada kelompok masyarakat miskin eks penerima manfaat program PNPM-MP) yang tergabung dalam keswadayaan Masyarakat (KSM) ekonomi program PNPM-MP dengan tujuan untuk mengkolaborasikan pencapaian 0 persen permukiman tanpa kumuh dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil *forum group disccusion* penelitian dilakukan melalui tindakan pemanfaatan lingkungan kumuh untuk kegiatan ekonomi produktif, dengan menanam tanaman apotik hidup dan warung hidup. Hasil penelitian berdampak luas pada masyarakat, bukan saja pada pengurangan lingkungan kumuh dan peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kearifan lokal dalam hal ini adalah kerja sama dan kerukunan dan juga mendidik generasi muda untuk cinta lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan studi kasus pada PNPM-Mandiri Perkotaan di Kabupaten Banyumas.

Table 2.1

Penelitian Terdahulu

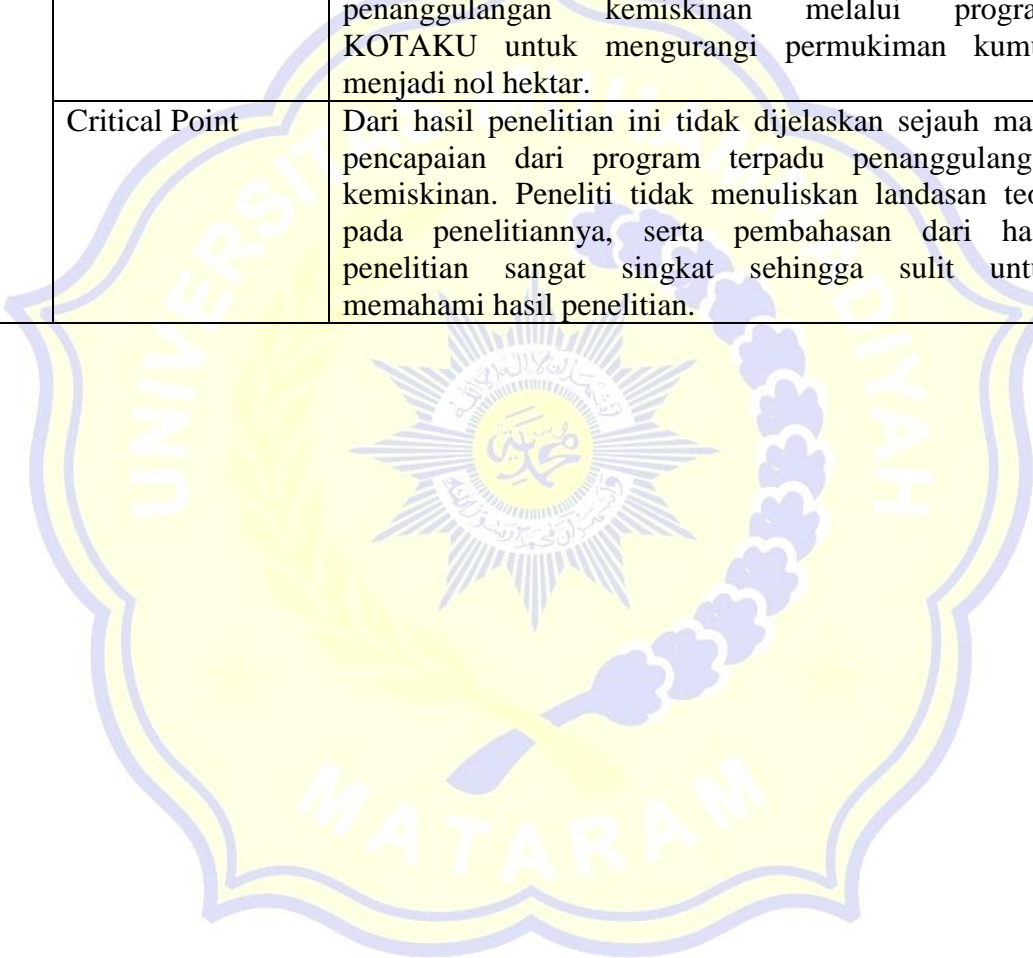
1.	Nama Peneliti	David Tiviyanto, Bambang Irawan, dan Enos Paselle (2019)
	Judul	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda
	Metode Penelitian	Metode penelitian deskriptif kualitatif
	Hasil	Dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan telah dilaksanakan, yaitu berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan khususnya pada kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang ada pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dikarenakan terbenturnya dengan pekerjaan utama dari masyarakat.
	Relevansi	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki keterkaitan pada kesamaan obyek, sehingga hasil dari penelitian tersebut setidaknya mampu memberikan sumbangsih ide bagi peneliti dalam menggali data terhadap informan.
	Critical Point	Dari penelitian ini, peneliti tidak menuliskan teori operasional, terlalu banyak menggunakan kata yang memiliki makna sama sehingga jatuhnya pemborosan kata. Serta dalam penelitian ini tidak menyertakan tahun penelitian.
2.	Nama Peneliti	Ahsanul Kholqi (2020)
	Judul	Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru
	Metode Penelitian	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif
	Hasil	Permukiman kumuh perkotaan muncul disebabkan ketidakmampuan atau kegagalan masyarakat untuk bisa bersaing menjangkau dan memiliki segala kebutuhan untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Adanya permukiman kumuh bisa jadi disebabkan oleh perkembangan dari kota tersebut. Maka dari itu pemberdayaan masyarakat bisa menjadi solusi alternatif untuk menangani masalah permukiman kumuh yang ada di Indonesia. Pemberdayaan merupakan suatu konsep untuk memberikan tanggungjawab yang lebih

		<p>besar kepada orang-orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan. Program KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Salah satu yang telah dibenahi melalui Program Kotaku adalah Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Tadinya Karangarangwaru yang merupakan kawasan kumuh, kini telah berubah menjadi kawasan yang aman, bersih, dan nyaman. Sungai Kali Buntung yang melintasinya sudah direvitalisasi sehingga air sungai tak lagi meluap, dan mampu menampung air hujan berintensitas tinggi. Selain itu, akses bantaran sungai juga digunakan sebagai jalur pemeliharaan sungai. Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru bisa dikatakan sudah baik terbukti dengan adanya pengembangan dan replica program yang dilakukan oleh masyarakat. Namun masih dibutuhkan pendampingan yang dilakukan baik Konsultan maupun pemerintah daerah kepada BKM agar program tetap terlaksana dan semakin baik.</p>
	Relevansi	<p>Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah memiliki keterkaitan sama-sama menggunakan konsep pemberdayaan yang bisa menjadi solusi alternatif untuk menangani masalah permukiman kumuh.</p>
	Critical Point	<p>Dari penelitian ini, peneliti tidak membuat rumusan masalah sehingga hasil yang dijelaskan juga tidak terarah, peneliti tidak mencantumkan dasar atau sumber untuk meneliti misalnya undang-undang. tidak dijelaskan secara detail kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Tetapi lebih banyak membahas mengenai kegagalan dari program tersebut. Tidak terdapat tahun penelitiannya.</p>
3.	Nama Peneliti	Lia Andriana, Asnawi Manaf (2020)
	Judul	Relevansi Aspek Kemiskinan dan Fisik Lingkungan Kumuh Pada Penentuan Lokasi Penerima Program KOTAKU (Studi Kasus Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan)
	Metode Penelitian	Metode penelitian kualitatif
	Hasil	Kemiskinan menyebabkan seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, serta keterbatasan terhadap akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik serta perumahan yang layak huni.

		Hal tersebut yang menjadi penyebab munculnya permukiman kumuh. Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kabupaten yang mendapatkan program KOTAKU dengan 7 (tujuh) kelurahan/desa yang menjadi prioritas penanganan untuk mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan permukiman yang baik dan sehat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji apakah ada relevansi antara kemiskinan dan permukiman kumuh pada lokasi penerima program KOTAKU di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
	Relevansi	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki keterkaitan mengenai permasalahan kemiskinan dengan penyelesaian menggunakan program KOTAKU.
	Critical Point	Dari hasil penelitian ini tidak dijelaskan sejauh mana pencapaian dari strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan. Tidak menjelaskan teori yang digunakan serta tahun penelitian tidak ada.
4.	Nama Peneliti	Nurhasanah (2019)
	Judul	Implementasi Kebijakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
	Metode Penelitian	Metode penelitian kualitatif
	Hasil	Pada tahap implementasi program KOTAKU di Kelurahan Merjosari dilaksanakan dalam 4 tahap utama yaitu pertama, tahap perencanaan dalam tahap ini program KOTAKU direncanakan sedemikian rupa kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan di Kelurahan Merjosari. Kedua, tahap survei lokasi dalam tahap ini kegiatan survei lokasi dilakukan oleh pihak faskel Kelurahan Merjosari. Dengan adanya tahap survei lokasi ini pihak faskel nantinya akan mengetahui keadaan lingkungan yang ada di Kelurahan Merjosari yang layak atau tidaknya dikatakan pemukiman kumuh dan dengan adanya surbvei lokasi. Ketiga, tahap pendanaan dalam tahap ini pendanaan sendiri berasal dari sumber APBN, sumber dana APBD Jawa Timur, sumber APBD Kota Malang, sumber dana swadaya masyarakat. Keempat, tahap pelaksana dalam tahap ini untuk program KOTAKU yang di laksanakan di Kelurahan Merjosari bahwasanya belum semuanya terlaksana hanya beberapa kegiatan yang sudah terencana seperti pembedahan rumah yang tidak layak, pembenahan lingkungan dan untuk permasalahan lain yang ada di masing-masing RW masih belum

		terencana. Jenis penelitian yang di ambil penulis adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Program penanganan pemukiman kumuh menjadi pemukiman yang layak huni di perkotaan, melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang memberikan peranan masyarakat yang lebih besar.
	Relevansi	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki keterkaitan mengenai penanggulangan kemiskinan. Penelitian tersebut membahas mengenai implementasi pemerintah daerah sementara peneliti membahas mengenai strategi pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan.
	Critical Point	Dari hasil penelitian ini tidak dijelaskan secara umum implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, serta tidak dijelaskan mengenai keberhasilan dari kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Peneliti tidak menuliskan landasan teori apa yang digunakan dalam penelitian.
5.	Nama Peneliti	Dijan Rahajuni, Suprpto, Sri Lestari, Lilis Siti Badriah (2018)
	Judul	Dampak Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Pada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Banyumas
	Metode Penelitian	Metode Penelitian kualitatif
	Hasil	Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2015 mencapai 18,44% lebih tinggi 7,22% dibandingkan dengan tingkat kemiskinan secara nasional yang mencapai 11,22%. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diluncurkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM – MP) yang sekarang diganti menjadi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Tujuan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Penelitian ini dilakukan pada kelompok masyarakat miskin eks penerima manfaat program PNPM-MP) yang tergabung dalam keswadayaan Masyarakat (KSM) ekonomi program PNPM-MP dengan tujuan untuk mengkolaborasi pencapaian 0 persen pemukiman tanpa kumuh dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil <i>forum group disccusion</i> penelitian

	<p>dilakukan melalui tindakan pemanfaatan lingkungan kumuh untuk kegiatan ekonomi produktif, dengan menanam tanaman apotik hidup dan warung hidup. Hasil penelitian berdampak luas pada masyarakat, bukan saja pada pengurangan lingkungan kumuh dan peningkatan pendapatan, tetapi juga pada peningkatan kearifan lokal dalam hal ini adalah kerja sama dan kerukunan dan juga mendidik generasi muda untuk cinta lingkungan.</p>
Relevansi	<p>Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama memiliki keterkaitan mengenai penanggulangan kemiskinan melalui program KOTAKU untuk mengurangi permukiman kumuh menjadi nol hektar.</p>
Critical Point	<p>Dari hasil penelitian ini tidak dijelaskan sejauh mana pencapaian dari program terpadu penanggulangan kemiskinan. Peneliti tidak menuliskan landasan teori pada penelitiannya, serta pembahasan dari hasil penelitian sangat singkat sehingga sulit untuk memahami hasil penelitian.</p>



2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Strategi

2.2.1.1 Definisi Strategi

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *strateus* dengan kata jamak strategi. *Strategos* sendiri memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana unruk memenangkan perang (Salusu, 2006:101). Penggunaan kata *strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh dengan menggunakan cara efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki (Brecker dalam Heene, 2010). George Steiner (dalam Rachmat, 2014: 2) mengartikan strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan. Strategi terdiri dari kegiatan penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Definisi strategi menurut Chandler (dalam Rangkuti, 2013: 3), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang, rencana tindak lanjut, dan prioritas alokasi sumber daya. Sedangkan menurut Argyris (dalam Rangkuti, 2013: 4), strategi merupakan respon eksternal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal, serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi.

Menurut Hamel dan Prahalad (dalam Purnamasari, 2016: 7), strategi adalah tindakan bertahap (meningkat) yang pelaksanaannya didasarkan pada perspektif harapan pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan

strategis hampir selalu dimulai dengan "apa yang mungkin terjadi" daripada "apa yang terjadi". Kecepatan inovasi di pasar baru dan perubahan model konsumen dengan daya saing inti. Perusahaan perlu menemukan daya saing inti dalam proses menjalankan bisnis.

2.2.1.2 Manajemen Strategi

Menurut Certo, 2010 mendefinisikan manajemen strategis adalah analisis, pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Definisi ini menjelaskan dua elemen utama dari manajemen strategis. Elemen pertama, manajemen strategis perusahaan terkait dengan analisis, pengambilan keputusan, dan proses tindakan yang sedang berlangsung. Manajemen strategis melibatkan bagaimana manajemen menganalisis tujuan strategis (visi, misi, tujuan) dan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Selain itu, perusahaan harus mengambil keputusan strategis. Keputusan tersebut harus mampu menjawab dua pertanyaan utama yaitu industri tempat perusahaan berada dan bagaimana perusahaan harus bersaing dengan industri tersebut. Akhirnya, langkah-langkah diambil untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Tindakan yang diperlukan akan mendorong manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan merancang organisasi untuk mewujudkan rencana tersebut.

Elemen kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa suatu perusahaan dapat mengalahkan perusahaan lain. Manajer perlu menentukan bagaimana perusahaan tidak hanya menciptakan keunggulan kompetitif yang unik dan berharga, tetapi juga sulit untuk meniru atau mencari alternatif untuk

membuatnya berkelanjutan untuk waktu yang lama. Keunggulan kompetitif jangka panjang biasanya diperoleh dengan melakukan aktivitas yang berbeda dari pesaing atau melakukan aktivitas yang sama dengan cara yang berbeda.

Barney (2007:27) manajemen strategis dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi. Pada saat yang sama, strategi adalah model alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi mempertahankan kinerja. Grant (2008: 10) strategi juga dapat diartikan sebagai rencana keseluruhan untuk menggunakan sumber daya untuk menciptakan posisi yang menguntungkan. Dengan kata lain, manajemen strategis melibatkan perumusan dan implementasi strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif.

Menurut Solihin (2012:64) manajemen strategis mengacu pada proses perencanaan, pembinaan, pengorganisasian dan pengendalian berbagai keputusan dan tindakan strategis perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sedangkan menurut Sofyan (2015: 4), manajemen strategis adalah proses pengambilan keputusan yang menggunakan sumber daya perusahaan seefisien mungkin dalam kondisi lingkungan perusahaan yang terus berubah.

Assauri (2013:9) berpendapat bahwa manajemen strategis adalah proses dimana organisasi atau organisasi perusahaan merumuskan dan mengimplementasikan strateginya. Dalam jangka panjang, keputusan strategis adalah keputusan yang berkaitan dengan perkembangan organisasi perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas yang berbeda secara signifikan dengan organisasi perusahaan. Sedangkan menurut Rachmat (2014: 16), manajemen strategis merupakan proses pengambilan keputusan yang dapat

mengarah pada perumusan strategi yang efektif atau membantu perusahaan mencapai tujuannya.

Manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi (Mulyadi, 2011: 40). Manajemen strategis adalah serangkaian dari pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang, kegiatan tersebut terdiri dari perumusan atau perencanaan strategis, pelaksanaan dan evaluasi (Wheelen, 2010: 105).

Manajemen strategis dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan (internal dan eksternal), perumusan strategi, implementasi strategi, pemantauan dan evaluasi strategi. Hal tersebut disusun dari system lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan: sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang dikenal sebagai SWOT maupun pendekatan peran (*policy*, strategi dan fungsi) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara luas maupun spesifik, seperti (Ritonga, 2020:11):

- a. Masuknya pendatang baru (skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan pemasok, akses ke saluran distribusi, kebijakan pemerintah dan lainnya).
- b. Ancaman produk pengganti (biaya/harga).
- c. Kekuatan tawar menawar pembeli (kuantitas, mutu dan ketersediaan).
- d. Kekuatan tawar menawar pemasok (dominasi, integrasi, dan keunikan).

Menurut David (2013:44) dalam perencanaan strategi terdapat tiga tahapan penting yang tidak mungkin untuk dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi, yaitu perumusan strategi, implementasi atau penerapan strategi dan evaluasi strategi. Proses manajemen strategi terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

1. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan tahapan awal dari manajemen strategis, yang meliputi perumusan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman bagi organisasi eksternal, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, perumusan alternatif strategi, dan pemilihan strategi khusus untuk mencapai tujuan.

2. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan tahapan selanjutnya setelah merumuskan strategi yang jelas. Penerapan strategi ini menuntut otoritas untuk mengambil keputusan dalam menetapkan tujuan tahunan, merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dirumuskan strategi dukungan budaya, perencanaan struktur organisasi yang efektif, pekerjaan pemasaran yang dilakukan ditata ulang, anggaran disiapkan, sistem informasi dikembangkan dan digunakan, dan kompensasi karyawan dikaitkan dengan kinerja organisasi.

3. Evaluasi Strategi

Evaluasi strategis adalah tahap terakhir dari manajemen strategis. Manajer sangat perlu memahami bahwa strategi tertentu tidak bekerja dengan baik. Evaluasi strategis adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi atau melaksanakan proses evaluasi strategi. Dalam evaluasi strategis terdapat tiga kegiatan evaluasi dasar, yaitu: meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, mengukur kinerja dan melakukan tindakan korektif. Perusahaan perlu mengevaluasi strategi karena strategi yang hanya berlaku saat ini tidak akan selalu efektif di masa depan.

Kuncoro (2010:174) berpendapat bahwa perumusan strategi penting dapat diintegrasikan ke dalam kerangka pengambilan keputusan yang meliputi tiga tahapan yaitu tahapan input, matching dan pengambilan keputusan. Tahap input adalah tahap untuk mengimpor dan meringkas informasi dasar yang diperlukan untuk merumuskan strategi. Menurut Kuncoro (2010:172) menyatakan bahwa proses manajemen strategi meliputi tiga tahapan yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Perumusan strategi meliputi merumuskan misi perusahaan, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, menetapkan tujuan jangka panjang perusahaan, membuat pilihan strategis, dan memilih untuk menerapkan strategi tertentu. Sementara itu, implementasi strategi menuntut perusahaan untuk merumuskan tujuan tahunan termasuk kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang

dirumuskan dapat dilaksanakan dengan benar. Implementasi strategi bertujuan untuk membangun budaya yang mendukung strategi, membentuk struktur organisasi yang efektif, mengubah arah kerja pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, dan mengaitkan kompensasi perusahaan dengan kinerja organisasi. Terakhir, ada evaluasi strategis, yang merupakan tahap akhir dari manajemen strategis. Manajer perlu mengetahui jika strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik.

Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah memperluas operasi atau diverifikasi, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan melakukan merger atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana menghindari pengambilalihan perusahaan pesaing. Keputusan perumusan strategis mengikat suatu organisasi pada produk, pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama periode waktu tertentu (Ritonga, 2020:15).

Menurut Riva'i, 2004 (dalam Yunus, 2016:20) bahwa proses manajemen strategi secara umum dapat dibagi dalam 3 langkah pokok yaitu:

1. Perumusan strategi (*Formulating strategy*)

Perumusan strategi meliputi perumusan visi dan misi, penentuan peluang perusahaan dan ancaman eksternal, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, perumusan alternatif strategi, dan pemilihan strategi khusus yang akan diterapkan.

2. Penetapan strategi (*implementing strategy*)

Implementasi strategi termasuk membangun budaya yang mendukung strategi, membangun struktur organisasi yang efektif dan memandu upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan mengotorisasi sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.

3. Evaluasi strategi (*evaluating*)

Evaluasi strategis adalah tahap terakhir dari manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk memperoleh informasi ketika strategi tidak berhasil. Karena faktor internal dan eksternal terus berubah, semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan. Tiga kegiatan dasar evaluasi strategis adalah: (1) Meninjau faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; (2) Penilaian kinerja; (3) Mengambil tindakan korektif.

2.2.1.3 Aspek-Aspek Strategi

Menurut Sukanto Reksohadiprodjo (2003:55-56), aspek manajemen strategis meliputi pengungkapan visi dan misi badan usaha, penetapan tujuan, pembuatan strategi, penerapan dan pelaksanaan strategi, serta evaluasi kinerja dan pelaksanaan penyesuaian dan tindakan korektif.

Sedangkan menurut Thompson dan Strickland (2003:6) dalam bukunya *Strategic Management* yang telah dialih bahasa ke dalam Bahasa Indonesia, secara umum, manajemen strategis memiliki aspek strategis yang harus selalu diperhatikan dalam menentukan strategi yang akan diterapkan. Aspek-aspek tersebut antara lain:

- a) Mengembangkan visi dan misi organisasi Setiap organisasi membutuhkan pernyataan misi tentang tujuan organisasi. Misi menjawab pertanyaan ini: Apa alasannya? Penting juga bagi manajer untuk menentukan tujuan dan strategi yang saat ini digunakan (Robbins dan Coulter, 2004:197)
- b) Mengatur tujuan organisasi, mengetahui terlebih dulu apa yang menjadi tujuan organisasi itu berdiri, sebelum merumuskan strategi dan sebagainya.
- c) Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan, manajer perlu merumuskan dan mengevaluasi berbagai strategi alternatif, dan kemudian memilih strategi dan strategi yang saling mendukung dan melengkapi yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan sebaik-baiknya keuntungan dan peluang lingkungannya.

- d) Menerapkan dan mengeksekusi strategi Setelah strategi dirumuskan, strategi harus dijalankan. Sebuah strategi hanya bagus jika dijalankan dengan benar. Tidak peduli seberapa efektif organisasi merencanakan strateginya, jika strategi tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, organisasi tidak akan berhasil.
- e) Evaluasi hasil, pantau perkembangan baru, dan buat perbaikan dan penyesuaian strategi. Langkah terakhir dalam manajemen strategis adalah mengevaluasi hasil. Seberapa efektif strategi diterapkan? Terlepas dari hasilnya, ini merupakan masukan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan strategi dan implementasi selanjutnya, jika ada, penyesuaian apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing organisasi relatif terhadap perkembangan baru.

2.2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Strategi

Penelitian yang dilakukan oleh Torres, dkk. (2006), mengajukan permasalahan yang berbeda, yaitu determinan atau faktor yang mempengaruhi manajemen strategi. Secara khusus, Torres, dkk, (2006) tersebut meneliti tentang faktor determinan implementasi manajemen strategik pada pemerintah lokal dengan konteks internasional. Menurut mereka ada tiga faktor utama yang mempengaruhi implementasi manajemen strategik pemerintah lokal di beberapa negara, yaitu: situasi sebelumnya yang melingkupi, personal (SDM), dan kepemimpinan dan kompromi (Wijayati, 2010:26).

Sedangkan menurut Tampubolon (2002) manajemen strategik hanyalah sebagai alat yang sangat bergantung pada pelakunya yaitu kepemimpinan dari

setiap tingkatan manajemen, kekuasaan yang dipunyai dan budaya organisasi. Secara singkat, bagi Tampubolon, ada tiga faktor determinan dari manajemen strategi, yaitu kepemimpinan, kekuasaan dan budaya organisasi. Pendapat Tampubolon tersebut sejalan dengan Bakar (2001) yang menyatakan bahwa manajemen strategi dengan berbagai model, seperti analisis portofolio, SWOT, maupun *stakeholder*, kepemimpinan tetap mempunyai peran yang penting. Berbagai model, strategi, transformasi akan sangat tergantung kepada faktor kepemimpinan. Kepemimpinan mempunyai peran dalam proses riil manajemen strategik, sebab manajemen strategik bukan sebuah obat mujarab, tetapi proses yang penuh ketegangan dan rintangan. Dan itu semua membutuhkan kepemimpinan yang benar-benar menyadari proses tersebut. Selain itu kepemimpinan berperan dalam proses pembentukan dan pembaruan misi dan tujuan organisasi dan penemuan-penemuan sumber daya baru bagi organisasi publik (Wijayati, 2010:26).

2.2.1.5 Evaluasi Strategi

Jika evaluasi strategis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi pengendalian strategis. Pengendalian strategi dapat dikatakan sebagai bentuk pengendalian arah sasaran. Biasanya ada jeda waktu yang cukup lama antara implementasi awal strategi dan pencapaian hasil yang diinginkan. Kontrol strategis sangat penting untuk mendorong perusahaan / organisasi melalui berbagai acara. Mereka harus memberikan dasar untuk menyesuaikan tindakan dan arah perusahaan dalam implementasi strateginya selama pengembangan dan perubahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pearce dan Robinson (2008) mendefinisikan bahwa pengendalian strategi adalah pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang diimplementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Bertolak belakang dengan pengendalian pasca tindakan, pengendalian strategi memedomani tindakan untuk kepentingan strategi ketika tindakan untuk kepentingan strategi ketika strategi tersebut dilaksanakan dan ketika hasil akhir masih beberapa tahun lagi baru tercapai. Walaupun demikian ada beberapa ciri tertentu yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu strategi. Menurut Rumelt (dalam Heene, 2010), karakteristik tersebut dapat dibagi menjadi empat standar umum, antara lain:

1. Konsistensi. Tidak ada pengenalan strategi untuk mengembangkan berbagai tujuan rencana atau langkah operasi yang tidak konsisten;
2. Penyesuaian diri. Strategi harus selalu merespons secara adaptif terhadap kendala yang muncul di lingkungan internal dan eksternal organisasi;
3. Penciptaan nilai. Strategi tersebut harus selalu mengembangkan solusi konseptual yang positif untuk mendorong upaya penciptaan nilai terbaik;
4. Potensi diri. Strategi harus selalu diperkenalkan agar tidak mengevaluasi secara berlebihan fasilitas yang tersedia atau merancang karya baru yang sulit ditangani.

2.2.2 Pemerintah Daerah

2.2.2.1 Definisi Pemerintah Daerah

Melihat definisi pemerintahan daerah, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Agustino, 2008: 1). Sekarang Pemerintah daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan di tingkat daerah atau lokal.

2.2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan-kewenangan tertentu. Kewenangan pemerintah daerah yaitu meliputi:

- a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d) Penyediaan sarana dan prasarana;
- e) Penanganan bidang kesehatan;
- f) Penyelenggaraan pendidikan;
- g) Penanggulangan masalah sosial;

- h) Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j) Pengendalian lingkungan hidup;
- k) Pelayanan pertahanan;
- l) Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m) Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n) Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Sunarno, 2008: 35-36).

Melihat konteks di atas kewenangan dari pemerintah daerah sangatlah kompleks, karena mempunyai wewenang yang strategis dalam berbagai sektor. Kewenangan-kewenangan tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam system pengelolaan daerah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perkembangan suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dan profesional akan mampu meningkatkan potensi daerah yang dikelolanya.

2.2.2.3 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Menurut Inu Kencana Safei (2011:104-105), menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan. Begitu pula Talizi dalam Inu Kencana Safie menyebutkan pengertian asas-asas pemerintahan yang berlaku secara umum sebagai berikut: Secara umum dapat dikatakan bahwa asas-asas pemerintahan tercantum di dalam pedoman-pedoman , peraturan-peraturan.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur pada Pasal 58 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas :

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggara Negara
3. Kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas
10. Keadilan

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas Umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut :

- a. Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

- d. Asas keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hakasasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas proporsional, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3 Kemiskinan

2.2.3.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan. Menurut Idham dan Pananrangi (2012: 33) Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Habibullah (2010: 42)

kemiskinan merupakan persoalan struktural, bukan individu. Karenanya persoalan yang berkaitan dengan mekanisme pasar dan pertumbuhan ekonomi semata-mata dianggap tidak akan mampu untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

BAPPENAS, 2004 (dalam Rubiyana, 2016:3) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Bank Dunia (dalam Djumiarti, 2005:885) mendefinisikan kemiskinan sebagai *concern with absolute standart of living of part of sociely the poor in equality refers to relative living standards across the whole society..* Artinya kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selanjutnya Specker (dalam Djumiarti, 2005:886) menyatakan bahwa kemiskinan mencakup : 1) Kekurangan fasilitas fisik bagi kehidupan yang normal, 2) Gangguan dan tingginya risiko kesehatan, 3) Risiko keamanan dan kerawanan kehidupan sosial ekonomi dan lingkungannya, 4) Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tak bisa hidup layak, dan 5) Kekurangan dalam kehidupan sosial

yang dapat ditunjukkan oleh ketersisihan sosial, ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan yang rendah.

2.2.3.2 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Ruang lingkup kemiskinan yang dikemukakan Chambers (dalam Handayani, 2018: 4) menjelaskan bentuk masalah kemiskinan dan faktor-faktor penyebab yang disebut dengan situasi kemiskinan. Konsep kemiskinan memperluas wawasan ilmu sosial tentang kemiskinan, bukan hanya kondisi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi kondisi ketidakberdayaan (kriminalitas) akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, perlakuan hukum yang rendah, dan kerentanan. Kejahatan (crime) .Risiko, perlakuan negatif politik, terutama perilaku yang tidak membantu meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri. Menurut keadaan kemiskinan yang dianggap sebagai bentuk masalah multidimensi, terdapat empat bentuk kemiskinan. Empat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut berarti pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan didefinisikan sebagai rata-rata pengeluaran atau rata-rata konsumsi kebutuhan dasar yang terkait dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak digunakan sebagai konsep standar untuk mendefinisikan atau mendefinisikan seseorang atau sekelompok orang yang disebut kemiskinan.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga mengakibatkan pendapatan yang tidak merata atau standar kesejahteraan yang tidak merata. Daerah yang tidak terjangkau oleh rencana pembangunan semacam ini sering disebut daerah rawan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan budaya adalah salah satu bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan pribadi atau sosial yang biasanya bersumber dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau menggunakan cara-cara modern untuk meningkatkan taraf hidup. Kebiasaan tersebut dapat berupa kemalasan, kemewahan atau tidak pernah berhemat, kurang kreatifitas, dan relatif bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kemiskinan semacam ini biasanya terjadi pada tatanan sosial budaya atau sosial politik yang tidak mendukung pengentasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan ini terkadang diskriminatif.

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang paling diperhatikan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama di negara pemberi bantuan / pinjaman seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Bank Pembangunan Asia. Kemiskinan struktural juga dianggap sebagai penyebab utama ketiga jenis kemiskinan di atas (Jarnasy, 2004: 8-9). Setelah dikenali

sebagai bentuk kemiskinan, maka disebut juga jenis kemiskinan menurut sifatnya. Jenis-jenis kemiskinan berdasarkan karakteristik kemiskinan antara lain: kemiskinan alam dan kemiskinan akibat ulah manusia.

1. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam, kurangnya infrastruktur umum (jalan raya, listrik dan air bersih), dan tanah yang tidak subur. Daerah dengan karakteristik tersebut biasanya merupakan daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan, sehingga menjadi daerah tertinggal.

2. Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh modernisasi atau sistem pembangunan, modernisasi atau sistem pembangunan ini tidak memberikan banyak kesempatan bagi masyarakat untuk secara merata menguasai sumber daya, sarana dan prasarana ekonomi. Kemiskinan seperti ini berdampak negatif pada konsep pembangunan (developmentalism) yang lazim dianut di negara berkembang. Tujuan pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan distribusi hasil pembangunan tidak merata, misalnya tingkat keuntungan sektor industri lebih tinggi dari pada sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas biasanya dikaitkan dengan konsep pembangunan, yang telah diterapkan di negara berkembang sejak tahun 1970-an dan 1980-an (Jarnasy, 2004: 8). Baik di lingkungan akademis maupun di tingkat pembuat kebijakan pembangunan, pembahasan kemiskinan dan penyebab kemiskinan masih menjadi bahan perdebatan (Suryawati, 2004: 123). Salah satu

perdebatan tersebut adalah mendefinisikan definisi orang atau kelompok orang miskin. Secara umum, pengidentifikasian kemiskinan hanya didasarkan pada indikator-indikator yang relatif dapat diukur, seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran konsumsi rata-rata. Karakteristik kemiskinan yang masih digunakan untuk menentukan kemiskinan adalah: Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.

1. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
2. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
3. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area).
4. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatka pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

2.2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan rumah tangga adalah: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kepemilikan asset (Handayani, 2018:7-8).

1. Tingkat pendidikan

Pengertian pendidikan menurut Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974 adalah segala sesuatu usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia Indonesia, jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik didalam maupun diluar sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila.

Menurut Notoatmodjo (2010), pendidikan merupakan upaya membujuk atau belajar dari masyarakat, sehingga masyarakat mau melakukan tindakan (praktek) untuk memelihara (mengatasi masalah) dan meningkatkan kesehatannya. Perubahan atau tindakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dihasilkan oleh pendidikan kesehatan didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, perilaku yang didasarkan pada pengetahuan diharapkan perilaku yang berkelanjutan (gigih) dan berkelanjutan. (gigih).

Dari beberapa definisi pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya persuasif yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik secara maksimal dalam kehidupan yang akan datang. Tingkat pendidikan merupakan tahapan pendidikan berkelanjutan yang ditentukan sesuai

dengan tingkat perkembangan peserta didik, kompleksitas bahan ajar dan cara penyajian bahan ajar (Ihsan, 2005).

Manusia membutuhkan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, dan dapat mencapai kemandirian melalui pendidikan. Efisiensi kerja membutuhkan pengetahuan, keterampilan dan kemahiran teknis. Oleh karena itu, dengan meningkatnya tingkat pendidikan karyawan maka kinerja karyawan akan meningkat dan tujuan perusahaan akan tercapai dengan sempurna (Uyoh, 2006).

2. Tingkat Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok seluruh penduduk, oleh karena itu kesehatan merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Menurut Juanita (Juanita, 2002), kesehatan merupakan salah satu modal utama dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi ini sekelompok orang harus dalam keadaan sehat. Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan yang sehat juga harus diperhatikan. Agar seluruh rakyat Indonesia sejahtera dan sejahtera, keduanya harus seimbang. Pembangunan sehat adalah proses peningkatan derajat kesehatan sekelompok orang dari kemiskinan ke tingkat yang memenuhi standar kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan yang sehat adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi.

3. Kepemilikan Asset

Rendahnya tingkat kepemilikan aset merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan (Kuncoro, 2004). Kepemilikan aset rumah tangga akan mempengaruhi akses pasar yang dapat diselesaikan oleh rumah tangga. Menurut Nanga (2005), kepemilikan aset mencerminkan kekayaan rumah tangga yang akan

mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga. Sedangkan menurut Sahdan (dalam Nasir, 2008), kepemilikan aset diartikan sebagai kepemilikan rumah tangga atas alat-alat produksi, yang selanjutnya mempengaruhi pendapatan yang akan diterima rumah tangga dari kepemilikan aset tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan aset keluarga akan mempengaruhi tingkat kemiskinan keluarga.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan rumah tangga adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berpengaruh besar terhadap kemiskinan. Dalam keluarga, tingkat pendidikan tertinggi yang diperoleh kepala rumah tangga merupakan hal yang krusial. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan, dan kepala rumah tangga merupakan sumber utama pendapatan keluarga. Oleh karena itu, pendidikan yang diterima kepala rumah tangga merupakan faktor penting dalam menentukan kesejahteraan keluarga.

Menurut Grouder (2005), memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada kepala rumah tangga akan meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga pendidikan merupakan cara yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Jenis utama pekerjaan rumah tangga adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan keluarga. Jenis utama pekerjaan rumah tangga adalah penentu jumlah pendapatan (dan pengeluaran) yang diterima keluarga.

Menurut Butar (2008), pekerjaan pokok kepala rumah tangga berdampak besar terhadap tingkat kemiskinan keluarga, karena tingkat upah tiap pekerjaan berbeda-beda. Di sektor pertanian, upah minimum yang akan diterima pekerja

akan lebih rendah dibandingkan di sektor lain (misalnya sektor industri). Di Indonesia, sebagian besar kepala keluarga miskin seringkali bekerja di sektor pertanian, antara lain tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. dan sub sektor pertanian.

Jumlah tanggungan dalam rumah tangga juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan rumah tangga. Jumlah tanggungan dalam rumah tangga ditunjukkan dengan besarnya jumlah anggota rumah tangga yang tidak bekerja berkorelasi negatif dengan konsumsi dan pendapatan perkapita tiap anggota keluarga. Menurut Mok T.Y (2010) jumlah tanggungan dalam rumah tangga (baik anak-anak, anggota usia produktif yang tidak bekerja dan lansia) kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan dalam rumah tangga dan pada akhirnya terjadi kemiskinan rumah tangga.

2.2.3.4 Pola Kemiskinan

Kemiskinan juga memiliki pola tersendiri baik antar daerah maupun antar individu/keluarga. Menurut Sumodiningrat (dalam Aulia, 2007:66) ada beberapa pola kemiskinan diantaranya sebagai berikut:

1. *Presistent Poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun. Daerah yang mengalami kemiskinan ini pada umumnya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi.
2. *Cylical Poverty*, yaitu pola kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
3. *Seasonal Poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering menjumpai pada kasus-kasus

nelayan dan petani tanaman pangan.

4. *Accidental Poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadi bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

2.2.3.5 Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000) sebagai berikut:

1. Munculnya kemiskinan makro disebabkan oleh distribusi pendapatan yang tidak merata akibat ketimpangan kepemilikan sumberdaya, masyarakat miskin memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitas yang rendah;
2. Kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas yang lebih rendah dan upah yang lebih rendah;
3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Terdapat beberapa faktor yang dinilai sebagai sebab terjadinya kemiskinan antara lain: (1) kesempatan kerja. Dikatakan seseorang itu miskin karena menganggur, sehingga tidak mendapatkan penghasilan atau jika bekerja tidak penuh, baik dalam hitungan hari, minggu, bulan maupun tahun, (2) upah gaji berada dibawah gaji minimum, (3) produktivitas kerja rendah, (4) ketiadaan aset, (5) diskriminasi, (6) tekanan harga, dan (7) penjualan tanah (Handayani, 2006).

Beberapa faktor lain yang disebut juga sebagai penyebab kemiskinan menurut Kartasmita (dalam Rahmawati, 2006) yaitu:

1. Rendahnya taraf pendidikan

Tingkat pendidikan yang lebih rendah akan berakibat pada terbatasnya kemampuan pengembangan diri dan sempitnya kesempatan kerja, serta akan membatasi kemampuan mereka untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

2. Rendahnya derajat kesehatan

Tingkat kesehatan dan gizi yang lebih rendah akan menurunkan ketahanan fisik, kemampuan berpikir dan inisiatif.

3. Terbatasnya lapangan kerja

Kondisi ketenagakerjaan yang terbatas akibat pendidikan dan kesehatan yang buruk membuat situasinya semakin rumit. Selama ada pekerjaan atau kegiatan usaha, masih ada harapan, selama masih ada harapan untuk memutus siklus kemiskinan.

4. Kondisi keterisolasian

Banyak warga yang tidak berdaya secara finansial karena berada di daerah terpencil dan terpencil. Mereka tinggal di daerah terpencil, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan layanan kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lain.

2.2.3.6 Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Rencana Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, sesuai dengan karakteristik sistem ekonomi kerakyatan, ada dua strategi utama yang harus ditempuh dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pertama, melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang miskin sementara akibat dampak negatif krisis

ekonomi dan kemiskinan struktural. Kedua, dengan memberdayakan masyarakat yang memiliki kemampuan usaha lebih tinggi dan mampu mencegah kemiskinan baru, berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan ekonomi termasuk pedagang, petani dan nelayan kecil, penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat (Propenas, 2003).

Program penyediaan sembako bagi keluarga miskin bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan masyarakat dalam menyediakan sembako, kesehatan, pendidikan dan perumahan dengan harga rata-rata yang terjangkau. Tujuan program ini adalah untuk terus memenuhi kebutuhan pangan keluarga miskin dengan harga yang terjangkau, serta menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan. Menyediakan perumahan bagi keluarga miskin dan menyediakan perumahan bagi keluarga miskin. Aktivitas Hal pokok yang dilakukan adalah: (1) Terus menyediakan dan mencadangkan sembako; (2) Pengendalian harga bahan pokok; (3) Pemberian pelayanan dasar khususnya pendidikan kesehatan; (4) Perluasan jaringan pelayanan dan penyediaan sembako ; (5) Memperbaiki lingkungan perumahan termasuk air bersih (Propenas, 2003).

Untuk program pengembangan budaya usaha masyarakat miskin dimaksudkan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan meningkatkan ketrampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Sasaran

program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan ketrampilan usaha, berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif, dan terwujudnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi keluarga miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah: (1) pengembangan pendidikan dan latihan ketrampilan kerja; (2) pendampingan melalui bimbingan konsultasi; (3) penciptaan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi; (4) penyediaan kemudahan akses terhadap sumber daya-sumber daya; (5) penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin; dan (6) penyediaan permukiman transmigrasi baru untuk petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian (Propenas, 2003).

2.2.4 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat dan mengambil langkah-langkah penguatan kelembagaan masyarakat agar dapat mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat yang saat ini tidak dapat lepas dari jeratan kemiskinan dan ketertinggalan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat (Sumaryadi, 2005: 111).

Menurut Suhendra (2006:2) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Kemudian, menurut Adisasmita (2006:35) Pemberdayaan

Masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, teknologi), (b) dari aspek proses (pelaksanaan, *monitoring* dan pengawasan), (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Menurut Mardikando (2012) pemberdayaan adalah upaya memenuhi kebutuhan individu, kelompok dan masyarakat luas yang memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan termasuk sumber daya yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya apapun yang dinikmati harus dihasilkan dari usaha sendiri. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah membuat masyarakat mandiri, berdaya, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Aspek terpenting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah program disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, keterlibatan kaum miskin dan kelompok terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat diperlukan strategi agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Menurut Suharto (2005) strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu mikro, mezo, dan makro. (1) Pendekatan mikro adalah pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat secara

individu melalui bimbingan konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*). (2) Pendekatan mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat melalui pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. (3) Pendekatan makro, memandang masyarakat sebagai bagian yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya (Maryani, 2019:8).

2.2.4.1 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaiki Kelembagaan, “*Better Institution*”

Dengan perbaikan tindakan/kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

2. Perbaiki Usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan

dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada disekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

3. Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4. Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan. Sebagai contoh, suatu kawasan menurut ketentuan pengetahuan yang berkembang harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak kurang lebih 40%. Hal itu berarti masyarakat diharapkan tidak semena-mena melakukan penebangan pohon yang bisa menyebabkan banjir ataupun tanah longsor. Dengan demikian kondisi lingkungan fisik akan tetap terjaga. Contoh lainnya, sebuah pabrik yang dimiliki oleh seorang pengusaha hendaknya

memperbaiki pembuangan limbah pabrik yang didapat sebagai ikutan dari hasil produksi barang yang diroduksinya.

Dalam kaitan ini pengusaha tersebut harus bertanggung jawab untuk tidak membuang limbah ke sungai atau jalan yang bisa menyebabkan tanah ataupun air disekitar pabrik tersebut tercemar oleh zat yang membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itulah pendapatan masyarakat harus memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bila kemiskinan terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan, karena terdesak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Jadi perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas.

5. Perbaikan Kehidupan “*Better Living*”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indicator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan Masyarakat “*Better Community*”

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan

sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.2.4.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip, yaitu: 1) prinsip kesetaraan; 2) prinsip partisipasi; 3) prinsip kewaspadaan atau kemandirian dan 4) prinsip keberlanjutan (Maryani, 2019:11-12).

1. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya.

2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendampingan yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

3. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemauan "*the have not*", melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit "*the have little*". Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Dalam kaitan ini diharapkan pihak pendamping melakukan apa yang digambarkan dalam peribahasa sebagai berikut: “Pihak yang melakukan upaya pemberdayaan tidak memberikan ikan, tetapi memberikan kail dan memberikan pengetahuan bagaimana cara memancingnya”. Dengan demikian, individu dari masyarakat yangterlibat dalam kegiatan pemberdayaan tersebut mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dan tidak tergantung kepada pihak mana pun.

4. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

2.2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyarakat pada sebuah komunitas bisa dianggap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan membawa manfaat yang lebih besar, namun dalam implementasinya masyarakat

tidak akan serta merta ikut dan berpartisipasi penuh dalam program tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat, yang oleh Sumaryadi (2005: 154-158) dijabarkan menjadi 8 faktor yang berpengaruh sebagai berikut:

1. Ketersediaan suatu komunitas untuk menerima pemberdayaan bergantung pada situasi yang dihadapinya.
2. Pemikiran bahwa pemberdayaan tidak untuk semua orang, dan adanya persepsi dari pemegang kekuasaan dalam komunitas tersebut bahwa pemberdayaan dapat mengorbankan diri mereka sendiri.
3. Ketergantungan adalah budaya, dimana masyarakat sudah terbiasa berada dalam hirarki, birokrasi dan kontrol manajemen yang tegas sehingga membuat mereka terpola dalam berpikir dan berbuat dalam rutinitas.
4. Dorongan dari para pemimpin setiap komunitas untuk tidak mau melepaskan kekuasaannya, karena inti dari pemberdayaan adalah berupa pelepasan sebagian kewenangan untuk diserahkan kepada masyarakat sendiri.
5. Adanya batas pemberdayaan, terutama terkait dengan siklus pemberdayaan yang membutuhkan waktu relatif lama dimana pada sisi yang lain kemampuan dan motivasi setiap orang berbeda-beda.
6. Adanya kepercayaan dari para pemimpin komunitas untuk mengembangkan pemberdayaan dan mengubah persepsi mereka tentang anggota komunitasnya.
7. Pemberdayaan tidak kondusif bagi perubahan yang cepat.

8. Pemberdayaan membutuhkan dukungan sumber daya (*resource*) yang besar, baik dari segi pembiayaan maupun waktu.

2.2.4.4 Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soekanto (dalam Maryani, 2019:13-14).

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu *pertama*, penyiapan petugas tebaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan *kedua*, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif. Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

2. Tahap Pengkajian “Assessment”

Tahapan ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “*exchange agent*” secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat memajukan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

4. Tahap Pemformalisasi Pencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tulisan terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

5. Tahap Implementasi Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader dihang sesuatu yang sudah diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antarpetugas dan masyarakat merupakan hal yang penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng di lapangan. Pada tahap ini

supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sasarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

6. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu system komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang pada periode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya sendiri untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

2.2.5 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai NAKHODA dalam penanganan permukiman kumuh

dan menyiapkan masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*). Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (*environment and social safeguard*).

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) serta dari lembaga mitra pembangunan pemerintah (*World Bank-WB; Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB dan Islamic Development Bank-IsDB*). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (Loan) sekitar 45%.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya

permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (*livelihood*) masyarakat.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Riva'i, 2004 (dalam Yunus, 2016:20) bahwa proses manajemen strategi secara umum dapat dibagi dalam 3 langkah pokok yaitu:

1. Perumusan strategi (*Formulating strategy*)

Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan.

2. Penetapan strategi (*implementing strategy*)

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memberdayakan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi.

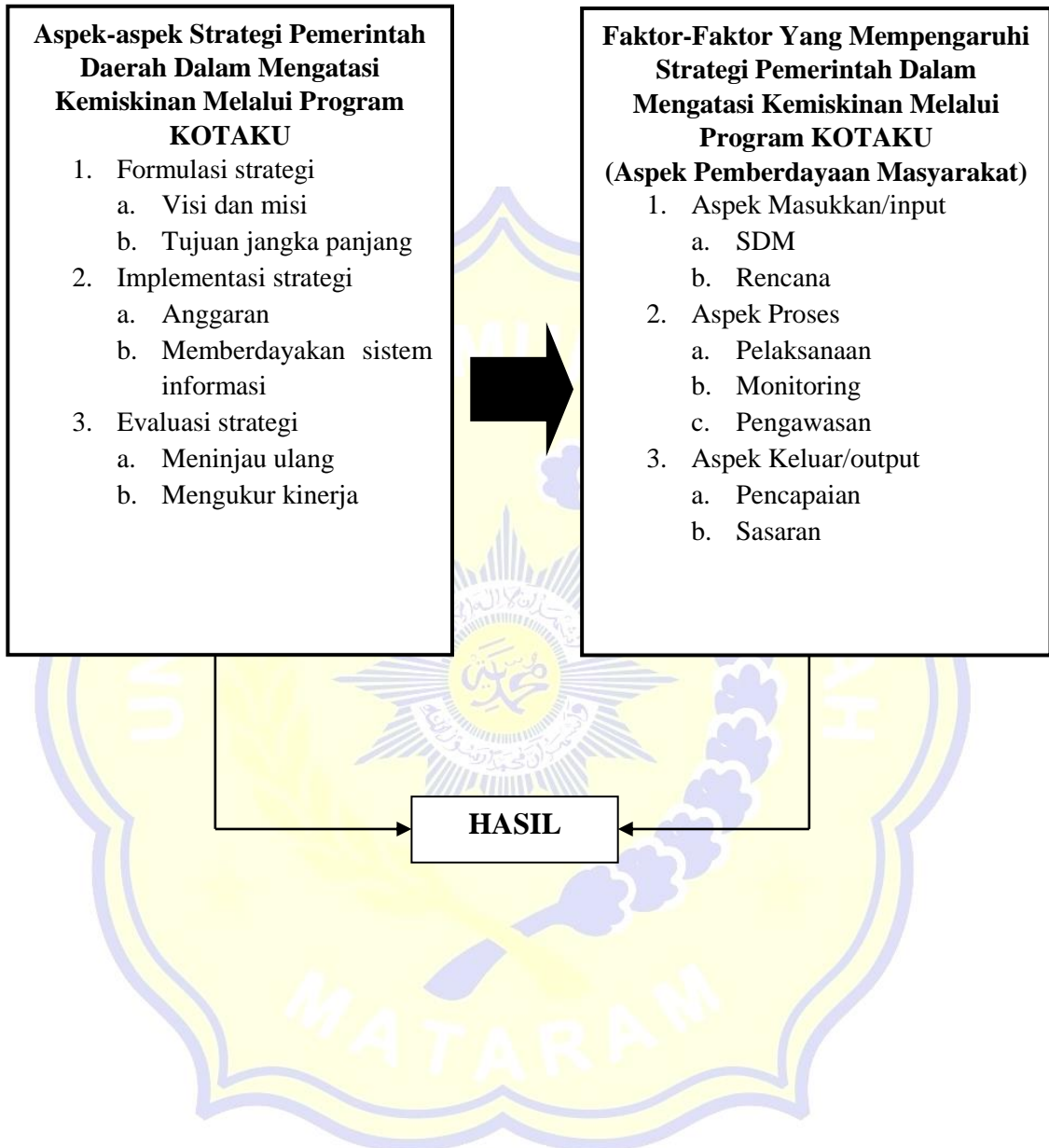
3. Evaluasi strategi (*evaluating*)

Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa datang karena faktor internal dan eksternal secara konstan berubah. Tiga aktifitas dasar evaluasi strategi adalah (1) Meninjau ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini; (2) Mengukur kinerja; (3) Mengambil tindakan korektif.

Menurut Suhendra (2006:2) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya gerakan terus-menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (*self propelled development*). Kemudian, menurut Adisasmita (2006:35) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, teknologi), (b) dari aspek proses (pelaksanaan, *monitoring* dan pengawasan), (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Bagan 2.1

Kerangka Berpikir Peneliti



2.3.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variable yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Maka dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain:

a. Strategi

Definisi strategi menurut George Steiner (dalam Rachmat, 2014:2) adalah secara umum mendefinisikan strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan (Sumaryadi, 2005:111).

2.3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu, definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti, yaitu:

- a. Aspek-aspek Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program KOTAKU
 1. Formulasi strategi
 - a. Visi dan misi
 - b. Tujuan jangka panjang
 2. Implementasi strategi
 - a. Anggaran
 - b. Memberdayakan sistem informasi
 3. Evaluasi strategi
 - a. Meninjau ulang
 - b. Mengukur kinerja

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program KOTAKU (Aspek Pemberdayaan Masyarakat)

1. Aspek Masukkan/input

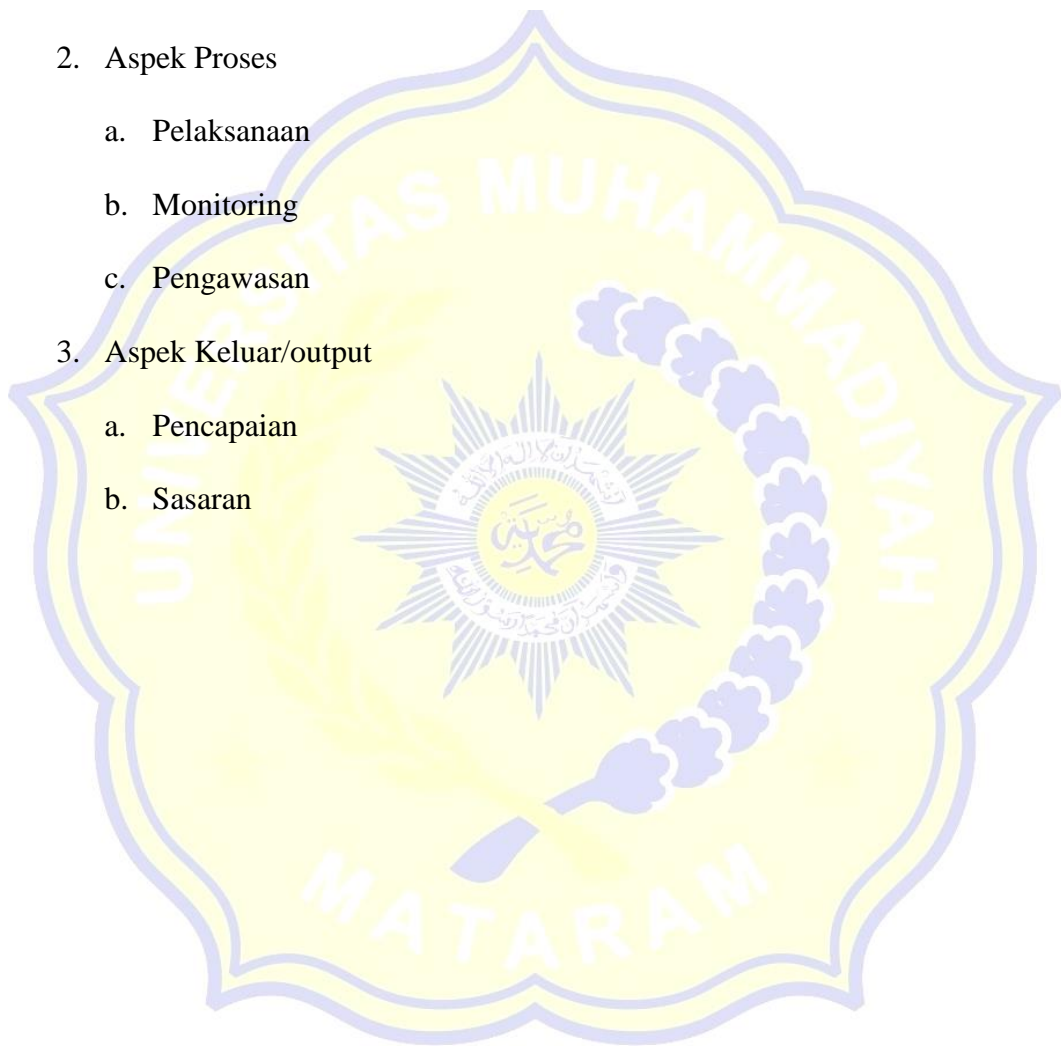
- a. SDM
- b. Rencana

2. Aspek Proses

- a. Pelaksanaan
- b. Monitoring
- c. Pengawasan

3. Aspek Keluar/output

- a. Pencapaian
- b. Sasaran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Suyanto, 2005:166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kecamatan Raba Kota Bima.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Raba Kota Bima. Alasan peneliti memilih lokasi di Kecamatan Raba karena Kecamatan Raba merupakan salah satu wilayah penerima Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

3.3 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kecamatan Raba Kota Bima.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu teknik *Snowball Sampling*. Selain itu menurut Hamid Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subjek peneliti. Adapun subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
2. Kepala Dinas PUPR
3. Kepala Dinas Perkim
4. Lurah
5. Ketua BKM

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksud untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang dilakukan adalah:

3.5.1 Teknik Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2008:72). Menurut Hadari Nawawi (2005:100) bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada

obyek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas. Dengan dasar teoritis yang mendalam kita lebih sadar akan asumsi-asumsi dan hipotesis untuk diuji kebenarannya berdasarkan observasi yang seobyektif mungkin (Nasution, 2009:110).

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistic dan jelas dari informan (Satori dan Komariah, 2009 : 47).

Dalam penelitian ini, wawancara stuktur adalah wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila penelitian atau pengumpulan data mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh. Dan pertanyaan tertulis dan jawaban alternatif juga sudah disiapkan.

3.5.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah ditujukan untuk data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter (Ridwan, 2008 : 77)

3.6 Sumber Data

Data merupakan rangkaian fakta mentah atau peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal fikiran di penerima data tersebut, sehingga data harus di olah terlebih dahulu agar dapat dikatan sebagai informasi. Data dapat berupa angka, kata, karakter, suara, ataupun simbol yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi.

Menurut Ridwan (2008 : 69) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (dalam Moelong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, 2005).

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama dilapangan berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data ini berupa data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variable penelitian atau strategi pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin melakukan wawancara dengan seluruh masyarakat Kecamatan Raba. Maka peneliti mengambil strategi untuk mewawancarai:

1. Kepala Bidang Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)
2. Kepala Dinas PUPR
3. Kepala Dinas Perkim

4. Lurah

5. Ketua BKM

3.6.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Data yang di hasilkan dari data ini adalah data sekunder. Data-data lain yang dibutuhkan sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan, seperti dokumentasi, Undang-Undang, arsip dan data-data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data peneliti (Ridwan, 2008).

Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip Pemerintahan Kecamatan, daftar penerima bantuan KOTAKU, catatan peneliti di lapangan, foto-foto kegiatan KOTAKU, serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus mengakibatkan data tunggal. Data yang diperoleh pada umumnya data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas (Sugiono, 2013:243). Bahwa melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit dan memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara lain tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang

dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda.

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah teknik kualitatif, dengan mengikuti alur kegiatan (Sugiyono, 2013:246-252). Yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasaan dan kedalaman wawancara yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3.7.2 Penyajian Data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori diagram aliran (*flowchart*) dan sejenisnya. Dalam hal ini yang digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (*verification/conclusion drawing*)

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ada bukti-bukti yang kuat, yang akan mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksud dari penggunaan grafik dan kata-kata ialah memberikan suatu kesan mudah ditangkap maknanya (Sugiyono, 2013:91-99).

